



Buruh Tercekik Migor dan BBM Mahal

■ Pemkot Yogya Prediksi Kenaikan Harga Picu Inflasi

YOGYA, TRIBUN - Kalangan pekerja menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta minyak goreng. Menurut mereka, dengan upah minimum yang sangat rendah, kebijakan tersebut membuat defisit antara pendapatan dan pengeluaran menjadi semakin tinggi.

Sejken DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Irsyad Ade Irawan mengatakan, sejak awal, buruh selalu menolak kenaikan harga. Apalagi, terhadap kebutuhan yang sifatnya fundamental, seperti BBM dan minyak goreng. Alhasil, ia pun tak dapat menyembunyikan kekecewaan.

"Pada faktanya, pemerintah ini melalui menurunkan harga pada pasar. Kemarin minyak goreng langka, kemudian harga diserahkan pasar, sekarang melonjak, dan melimpah ruah. Nah, BBM sama, alasannya karena perang Rusia-Ukraina, semua diserahkan pasar," ujarnya. Senin (4/4).

Irsyad menjelaskan, ketika mekanismenya terus menerus dibiarkan seperti itu, yang terjadi ialah, kalangan buruh dan pekerja tidak cukup kuat menghadapi gejolak pasar, yang sukar ditebak, serta cenderung mengalami kenaikan. Hal tersebut, menjadi pukulan telak bagi buruh di DIY.

"Ya, di Yogyakarta upah buruh sangat murah. Kalau secara provinsi, seka-

rang nomor dua termurah di Indonesia. Tentu, kenaikan harga BBM ini sangat merugikan. Bayangkan saja, berapa defisit buruh setiap bulan," ungkapnya.

Sebab, dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY yang kini berada di angka Rp1.840.915, berdasarkan hasil survei pada Oktober 2021 silam, defisit sudah terjadi. Sehingga, ia pun memastikan, dengan lonjakan banderol BBM dan minyak goreng, defisit buruh di kota pelajar makin lebar.

"Kalau ditambah harga BBM dan minyak goreng naik, maka ekonomi buruh di Yogyakarta semakin lemah saat masuk Ramadan dan jelang hari raya Idulfitri," cetusnya.

Ia pun menyampaikan, sejatinya kalangan buruh tak pernah meminta peningkatan upah yang terlampau tinggi. Hanya saja, KSPSI berharap, besaran yang ditetapkan setiap tahun benar-benar cukup untuk menopang biaya hidup.

"Upah tidak gede tidak masalah. Sepanjang, upah itu cukup untuk mencukupi kebutuhan pokok. Nah, di Yogyakarta ini, masalahnya upah murah, tapi harga tidak terkendali. Tidak hanya BBM, tapi juga perumahan," tegas Irsyad.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memprediksi, kenaikan banderol bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax dan minyak goreng

akan berdampak pada angka inflasi. Namun, eksekutif tetap berkomitmen untuk menjaganya di angka 3 persen plus minus 1.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Yogya, Kadri Renggono, berujar, perhitungan secara pasti merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS). Karenanya, seberapa besar pengaruh dari lonjakan harga dua komoditas itu, belum dapat dipastikannya.

"Tapi, pasti ada pengaruhnya pada inflasi. Selama ini terkait minyak itu jarang, karena komoditi seperti beras, daging, bawang dan cabai yang pengaruhnya signifikan. Jadi, apa nanti muncul, ya tunggu saja perhitungan dari BPS, atau prediksi dari Bank Indonesia," urainya.

Kadri mengungkapkan, upaya yang dapat ditempuhnya kini ialah, dengan menjaga aspek distribusi komoditi yang masuk kategori *voletail food* tersebut. Yakni, terkait psikologi warga masyarakat, memastikan kebutuhan cukup dan tersedia banyak di pasaran, agar tidak terjadi *panic buying*.

"Informasi-informasi semacam itu penting, supaya penduduk tidak panik dan mendorong membelinya secara berlebihan. Makanya, itu harus kita jaga, bersama *stakeholder* terkait, agar tidak melebihi 3 persen plus minus 1," katanya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perdagangan			

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005